Jurnal Mercatoria

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria>

Dikirim: 29 Juni 2020; Diterima: 23 Desember 2020; Diterbitkan: 28 Desember 2020

Penerapan Asas Pencemar Membayar dalam Perkara Perdata Lingkungan Hidup (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 79/Pdt./2014/PTR)

Application of Paying Pollutant Principle in Environmental Civil Cases (Study of Riau High Court Decision Number 79 / Pdt. / 2014 / PTR)

Leonardo Siregar*

Program Studi Magister Hukum, Pasca Sarjana Universitas Medan Area, Indonesia

*Corresponding Email: fritsleo18@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang tanggungjawab pemerintah kepada masyarakat pada saat terjadinya pencemaran lingkungan hidup yang berdampak langsung pada lingkungan hidup dan penerapan dari asas pencemar membayar dalam perkara perdata lingkungan hidup di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab pemerintah terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat melalui pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemberian izin dan pengawasan izin lingkungan dan penegakan hukum lingkungan baik secara administrasi, perdata dan pidana. Penerapan Asas Pencemar Membayar dalam Perkara Perdata Lingkungan Hidup di Indonesia diatur berdasarkan Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 88 UU No. 32 tahun 2009 tidak terlaksana karena semua gugatan dalam permohonan banding penggugat ditolak oleh 2 orang majelis Hakim, hanya hakim ketua yang berbeda pendapat.

Kata Kunci: Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Asas Pencemar Membayar, Pemulihan Lingkungan Hidup.

Abstract

This study examines the government's responsibility to the community when environmental pollution occurs which has a direct impact on the environment and the application of the polluter pays principle in civil environmental cases in Indonesia. The research method used is a normative legal research method with the approach of statutory regulations. The government's responsibility for environmental pollution and damage can be through the formation of laws and regulations and policies related to environmental protection and management, granting of permits and monitoring environmental permits and enforcing environmental laws both administratively, civil and criminal. The application of the Polluter Pays Principle in Civil Environmental Cases in Indonesia is regulated based on Article 87 paragraph (1) and Article 88 of Law no. 32 of 2009 was not implemented because all of the claims in the plaintiff's appeal were rejected by 2 panels of judges, only the presiding judge had different opinions.

Keywords: Pollution and Environmental Damage, Pollution Pays Principle, Environmental Recovery

How to Cite: Siregar, L. (2020). Penerapan Asas Pencemar Membayar dalam Perkara Perdata Lingkungan Hidup (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 79/Pdt./2014/PTR). *Jurnal Mercatoria*. 13 (2): 143-156.

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup yang terganggu keseimbangannya perlu dikembalikan fungsinya sebagai kehidupan dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan keadilan antar generasi dengan cara meningkatkan pembinaan dan penegakan hukum. Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan tiga bidang hukum yaitu administratif, pidana dan perdata. Dengan demikian penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sarana administratif, kepidanaan dan keperdataan. (Rangkuti, 1996)

Penegakan hukum administratif ditujukan untuk upaya pencegahan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan serta bertujuan untuk menghukum pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan secara administrasi. Penegakan hukum perdata merupakan sarana penegakan hukum yang bertujuan untuk meminta ganti kerugian oleh korban kepada pelaku pencemar dan perusak lingkungan. Upaya hukum perdata merupakan upaya hukum yang membantu meringankan tugas negara artinya negara

tidak perlu mengeluarkan biaya penegakan hukum (*law enforcement cost*) karena penegakan hukum perdata dilakukan oleh masyarakat, dan otomatis biayanya ditanggung oleh masyarakat.

Penegakan hukum pidana dipandang sebagai *ultimum remedium* atau upaya hukum terakhir karena penegakan hukum disini bertujuan untuk menjatuhkan pidana penjara atau denda kepada pelaku pencemaran dan/atau perusak lingkungan hidup. Jadi penegakan hukum pidana tidak berfungsi untuk memperbaiki lingkungan yang tercemar. Namun demikian, bahwa penegakan hukum pidana ini dapat menimbulkan faktor penjera (*deterrant factor*) yang sangat efektif. Oleh karena itu dalam praktiknya penegakan hukum pidana selalu diterapkan secara selektif. (Husein, 2009)

Prinsip pencemar membayar merupakan salah satu prinsip yang penting dalam pengelolaan lingkungan, selain prinsip *the sustainable development, the prevention principle, the precautionary principle, and the proximity principle*. Asas ini pertama-tama tercantum dalam beberapa rekomendasi *The Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) pada tahun 70-an yang pada dasarnya menyatakan bahwa asas pencemar membayar mewajibkan para

pencemar untuk memikul biaya-biaya yang diperlukan dalam rangka upaya-upaya yang diambil oleh pejabat publik untuk menjaga agar kondisi lingkungan berada pada kondisi yang dapat diterima, atau dengan kata lain ialah bahwa biaya-biaya yang diperlukan untuk menjalankan upaya-upaya ini harus tercermin di dalam harga barang dan jasa yang telah menyebabkan pencemaran selama dalam proses produksi atau proses konsumsinya. Namun demikian, muncul penentangan dengan alasan:(Malvin Edi Darma dan Ahamad Redi, 2018)

- a. Pemulihan lingkungan tidak ada artinya dalam hal terjadinya kerusakan hebat yang dampaknya tidak dapat diselesaikan dengan ganti kerugian murni;
- b. Pemulihan kerusakan mengandung banyak kesulitan misalnya dampak jangka panjang dan penemuan dampak tidak langsung;
- c. Perkiraan biaya kerusakan terhadap biaya pemulihan perbaikan kerusakan seringkali sia sia dai segi ekonomi

Menurut OECD, upaya pengendalian pencemar melibatkan biaya seperti biaya alternatif penerapan kebijaksanaan anti pencemaran, biaya pengukuran dan pemantauan pengelolaan, biaya riset, pengembangan teknologi unit-unit

pengelola pencemaran, dan perawatan instalasi unit-unit pengelolaan limbah. Prinsip-prinsip yang diterapkan oleh OECD tercakup dalam 7 kebijaksanaan yang diambil yaitu(Siahaan, 2014):

- a. Pengendalian langsung;
- b. Perpajakan;
- c. Pembayaran;
- d. Subsidi;
- e. Macam-macam kebijakan yang bersifat intensif seperti keuntungan pajak, fasilitas kredit, dan amortasi atau pelunasan hutang yang dipercepat
- f. Pelelangan hak-hak pencemaran
- g. Pungutan-pungutan

Secara umum tujuan dari prinsip pencemar membayar adalah untuk melakukan internalisasi biaya lingkungan yang diakibatkan oleh kerusakan dan pencemaran lingkungan. Pencemar wajib bertanggung jawab untuk menghilangkan atau meniadakan pencemaran atau kerusakan yang disebabkan oleh tindakannya atau perusahaan.

Adanya Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) adalah payung hukum (*umbrella act*) bagi peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai lingkungan hidup, namun dalam penerapannya mengalami beberapa kelemahan. Selain

UUPPLH masih terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang bersentuhan dengan masalah lingkungan pada hukum positif Indonesia diantaranya:

- a) Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria;
- b) Undang-undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Perairan;
- c) Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Pertambangan;
- d) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- e) Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
- f) Undang-undang 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
- g) Peraturan perundang-undangan lainnya;

Beberapa kasus lingkungan hidup yang memiliki akibat cukup besar kepada masyarakat diantaranya Kasus Newmont Minahasa Raya (2004) dan Kasus Lapindo Brantas (2005). Dua kasus besar dalam bidang lingkungan hidup yang pernah terjadi di Indonesia tersebut merupakan akibat ketidakkonsistenan pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup untuk menyatakan bahwa lingkungan hidup disekitar terjadinya pencemaran sudah dalam kondisi gawat darurat.

Misalnya, pada kasus Newmont Minahasa Raya, pihak perusahaan yang nyatanya telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup masih menyatakan bahwa "lingkungan yang tercemar masih dibawah standar". Akibatnya para korban tidak mendapatkan kompensasi dan ganti kerugian akibat kerusakan lingkungan yang mengakibatkan masyarakat secara langsung terkena akibatnya. Pelaku perusakan lingkungan pada kasus Newmont Minahasa Raya bebas dari segala tuntutan.

Pada hakikanya bahwa pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dapat saja dilakukan pencegahan dengan cara merubah strategi dan pendekatan pembangunan selama ini yang hanya menekankan pada segi pertumbuhan ekonomi saja, semestinya haruslah pula dapat menampung kehendak dari aspek sosial dan lingkungan hidup(Erwin, 2011).

Berdasarkan kesepakatan internasional didalam Prinsip ke-21 dari Deklarasi Lingkungan Hidup PBB di Stockholm pada tahun 1972 berbunyi:

"State have, in accordance with the charter of the United Nation and the principles of International law, the sovereign rights to exploit their own resources pursuant to their own environmental policies, and the responsibility to ensure that activities

within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other state or of areas beyond the limits of national jurisdiction"

Prinsip ini menegaskan kedaulatan masing-masing negara terhadap pengelolaan sumber daya alam sekaligus menempatkan negara sebagai penanggungjawab pengelolaan lingkungannya, yang dapat diartikan juga bahwa negara bertanggungjawab terhadap hal untuk mencegah dan apabila terjadi pencemaran dalam wilayah hukum dari negara tersebut.

Indonesia sebagai pihak yang pertama kali memperkenalkan *polluter pays principle* yang kemudian mengadopsi ke dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 2 Huruf j dengan asas "pencemar membayar" dan dengan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan "asas pencemar membayar" adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Prinsip *negligence* adalah Pencemar bertanggungjawab jika tidak optimal mengambil langkah-langkah

pencegahan (*optimal care*) (lihat Pasal 99 UU PPLH, sehingga calon pencemar yang rasional akan mengambil langkah optimal sepanjang biaya-biaya ganti rugi lebih besar dari pada biaya pencegahan optimal. Sedangkan prinsip *strict liability* adalah Pencemar bertanggungjawab apabila terjadi kerugian tanpa melihat apakah ia telah mengambil langkah pencegahan secara optimal atau tidak (lihat Pasal 87 UU PPLH 2009). Hal ini dimaksudkan agar calon pencemar akan melakukan pencegahan semaksimal mungkin karena kerugian akan semakin minimal ketika pencegahan maksimal dilakukan.

Setiap pencemaran yang terjadi harus dipertanggungjawabkan maka asas pencemar membayar (*polluter pays principles*) menderivasikan tanggungjawab pencemaran lingkungan dari negara kepada pihak pemegang konsesi, sekaligus menegaskan bahwa resiko pencemaran yang terjadi dari dan atau akibat setiap kegiatan usaha menjadi tanggungjawab pemegang izin baik akibat kelalaiannya (*negligence*) maupun karena tanggungjawab mutlak (*strict liability*) yang melekat atas perizinan.

Di dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 terdapat ketentuan bahwa penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya

menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya, dan beracun, bertanggungjawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau lingkungan hidup (Pasal 35 UUPPLH).

Ketentuan UUPPLH mengkaitkan penanggungjawaban, kerugian dan pencemaran/kerusakan lingkungan. Didalam UUPPLH menegaskan bahwa setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu(Wibisana, 2017).

Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat hal-hal sebagai berikut;

- a. Penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih terjadi tebang pilih, dan penerapan hukuman bagi pelaku pencemaran lingkungan tidak maksimal;
- b. Penegakan hukum bagi pencemaran lingkungan hanya berfokus pada penegakan hukum pidana penjara

tanpa menambahkan denda kepada pelaku pencemaran lingkungan;

- c. Penegakan hukum lingkungan selama ini dilakukan hanya berfokus pada tindakan represif tidak diikuti dengan tindakan pemulihan lingkungan yang rusak akibat pencemaran lingkungan.

Oleh karena itu perlu diketahui beberapa hal yang akan dibahas yakni:

- (1) Bagaimana tanggungjawab pemerintah kepada masyarakat pada saat terjadinya pencemaran lingkungan hidup yang berdampak langsung pada lingkungan hidup?
- (2) Bagaimana penerapan asas pencemar membayar dalam perkara perdata lingkungan hidup studi Putusan Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 79/Pdt./2014/PTR)
- (3) Bagaimana Politik Hukum Pemerintah Indonesia tentang prinsip pencemar membayar dalam kasus lingkungan hidup?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian hukum normatif(*legal research*)(Ibrahim, 2008). Metode Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptional. Penelitian ini menggunakan sumber data

sekunder sebagai sumber data utama, yang dilengkapi dengan sumber data primer sebagai pendukung. Lazimnya sebuah penelitian hukum normatif, sumber data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*), baik dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier sebagai data utama atau data pokok penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggungjawab Pemerintah kepada Masyarakat pada Saat Terjadinya Pencemaran Lingkungan Hidup

Pelaksanaan tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat dalam bidang lingkungan adalah memberikan masyarakat lingkungan yang sehat dan bersih serta terhindar dari pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Didalam UU No. 32 tahun 2009 menyebutkan bahwa Negara bertanggung jawab dalam lingkungan yang dapat didefinisikan bahwa (Arifin, 2014) :

- 1) Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan;
- 2) Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;

- 3) Negara mencegah dilakukannya kegiatan/pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

Beberapa bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap lingkungan, yakni:

- a. Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Rangka Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Terkait Lingkungan
- b. Tanggung Jawab Pemerintah dalam Perizinan dan Pengawasan Izin Lingkungan
- c. Tanggung Jawab Pemerintah dalam Penegakan Hukum Lingkungan.

UU No. 32 tahun 2009 merupakan hukum fungsional (*functioneelrechtsgebeid*) yang menyediakan 3 (tiga) pendekatan penegakan hukum lingkungan yaitu:

- a. Pengakan Hukum Administrasi
- b. Penegakan Hukum Perdata;
- c. Penegakan Hukum Pidana

Penerapan Asas Pencemar Membayar dalam Perkara Pidana Lingkungan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 79/Pdt./2014/PTR

Para pihak dalam Perkara Nomor 79/Pdt/2014/PT.R, yakni Pihak Penggugat/Pembanding adalah Kementrian Lingkungan Hidup Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan DI

Panjaitan Kav 24 Kebon Nanas Jakarta Timur dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Balthasar Kambuaya MBA dalam kedudukannya sebagai Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia oleh Karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kementrian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa dengan hak Substitusi kepada 1. A. Patramijaya, SH,LLM, 2. Berto Herora Harahap SH, 3. Aries Surya,SH,M.Si, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2013.

Pihak Tergugat/Terbanding adalah PT Merbau Pelalawan Lestari, sebuah Perusahaan yang bergerak di bidang Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, berkedudukan Hukum di Jalan Khairuddin Nasution No. 169 Pekanbaru, Provinsi Riau, diwakili oleh Jimmy Bonaldy Pangestu Direktur Utama, berdasarkan Akte Notaris No. 41 tanggal 13 September, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suhendro, M.Hum, Advokad yang beralamat di Jalan Pembangunan Gang Pembangunan No. 48 Rumbai Pesisir Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2013.

Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru di bawah Register Nomor 157/Pdt.G/2013/PN.PBR tanggal

26 September 2014 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Kedudukan dan Kepentingan Hukum Penggugat

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 dengan tegas menyatakan: "Bumi, air dan kekayaan alam yang berada didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat";

Penggugat mempunyai obligasi (kewajiban) untuk mewujudkan perekonomian nasional berdasarkan atas prinsip berwawasan lingkungan serta berkewajiban untuk melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat (vide Pasal 33 ayat (4) jo. Pasal 28 ayat (1) UUD 1945);

Kedudukan hukum (standi in judicio) Penggugat untuk mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum pencemaran lingkungan hidup telah diterima dan diakui secara formal oleh badan peradilan di Indonesia sebagaimana dapat dilihat dalam perkara Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Pencemaran Lingkungan Hidup dalam Perkara Nomor 38/PDT.G/2008/PN. PKL tanggal 22 Desember 2008 di PN Pekalongan

antara Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

Pengakuan kedudukan hukum Penggugat telah dijamin oleh undang-undang baik dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (vide Pasal 1 angka 25 jo. Pasal 1 angka 2, Pasal 3, Pasal 8, Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1)) dan semakin dipertegas dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU 32/2009") (vide Pasal 90 ayat (1))

Tergugat telah merusak lingkungan hidup yang mana dilakukan dengan cara:

- a. Melakukan penebangan hutan diluar lokasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT);
 - b. Melakukan penebangan hutan didalam lokasi IUPHHK-HT, dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Permohonan atas Kerugian yang disebabkan oleh Tindakan Tergugat.

Berdasarkan atas perbuatan melanggar hukum dan kesalahan yang telah dilakukan Tergugat telah

menimbulkan kerugian lingkungan hidup, sehingga Tergugat wajib untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup tergolong sebagai kerugian yang bersifat tetap.

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Permen Lingkungan Hidup 13/2011 a quo, komponen kerugian akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup ganti ruginya harus dibayarkan secara utuh, bukan dengan adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat.

Secara terperinci, Penggugat akan menguraikan perhitungan kerugian secara rinci, yang diakibatkan tindakan perusakan dan atau kerusakan lingkungan hidup yang telah dilakukan Tergugat berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.

Dengan demikian, jelas unsur adanya kerugian dan/atau biaya

pemulihan kerugian perusakan lingkungan hidup yang mesti dibayarkan Tergugat terpenuhi.

Untuk menghindari dampak dan kerugian yang lebih meluas akibat perbuatan perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka sepatutnya apabila Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk terlebih dahulu menghukum dan memerintahkan penghentian sementara kegiatan operasional TERGUGAT sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tidak menerapkan ketentuan UU No. 32 tahun 2009, bahwa *Polluters Pays Principles* yang merupakan Prinsip pembuat polusi dan pengguna yang membayar, merupakan prinsip yang paling dikenal walau belum dijalankan secara maksimal, termasuk dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya dalam UU No. 32 tahun 2009. Berdasarkan prinsip ini, negara seharusnya dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa penyebab dan pemakai yang menghasilkan polusi dari sumber alam bertanggung jawab penuh kepada lingkungan dan biaya sosial dari aktivitasaktivitas mereka. Prinsip ini

dirancang untuk melakukan internaslisasi dari eksternalitas lingkungan. Akan tetapi dalam kasus ini, hanya seorang hakim yang berpendapat demikian.

Berdasarkan pembahasan *strict liability*/tanggungjawab mutlak tersebut, maka Kedudukan Pasal 88 UU 32 tahun 2009 seharusnya mampu “menjangkau” pelaksanaan *polluters pays*. Pasal 88 tersebut sudah memasukkan unsur *abnormally dangerous activity* pada kalimat “..... yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.” Artinya, bila kegiatannya menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan, maka pelaku usaha atau kegiatan dapat digugat berdasarkan tanggungjawab mutlak ini. Pasal ini “lebih mudah” dalam hal pembuktian, karena bila kegiatannya berbahaya (menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup), terdapat kerugian dan adanya kausalitas antara perbuatan dan dampaknya, maka bisa langsung dinyatakan bertanggungjawab oleh hakim.

Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau dalam perkara ini mampu menerapkan asas *Polluters pays principles* diterapkan dengan lebih “powerfull” lagi dengan menggunakan Pasal 88 UU 32 tahun 2009 tersebut. Sehingga pertanggungjawaban pada usaha/kegiatan di darat atau pun laut

dapat dikenai asas *polluters pays principles* berdasarkan *strict liability*.

Di dalam Peraturan perundangan yang dapat menerapkan prinsip pencemar membayar adalah UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya pada Pasal 87 dan Pasal 88, yaitu yang mengatur mengenai pertanggungjawaban perdata.

Proses perlindungan lingkungan tersebut, bertujuan akhir pada terlaksananya pembangunan berkelanjutan. Tanpa adanya upaya penegakan hukum yang optimal maka pembangunan berkelanjutan tidak dapat dicapai, karena objek dan subyek lingkungan di laut di rusak dan/atau dicemari oleh berbagai kegiatan usaha.

Dalam hal Pendekatan yang dipergunakan pada dasarnya adalah pencegahan, pengawasan, dan terakhir penindakan. Hal tersebut terlihat jelas dalam pengaturan perundang-undangan yang ada. Pencegahan dimulai dari proses awal, yaitu perencanaan dan perizinan yang dikenal dengan proses Administrasi. Pengawasan dilakukan ketika kegiatan berlangsung, yaitu melalui lembaga-lembaga pengawasan, baik internal Kementerian, seperti Pejabat Pengawas Lingkungan internal, atau oleh Pejabat Pengawas Lingkungan yang terdapat pada

kelembagaan lingkungan di Pusat (Kementerian) dan di Daerah (Badan Lingkungan Hidup Daerah). Terakhir adalah penindakan, yaitu dalam hal terjadinya kesalahan/pelanggaran Administrasi, maka PPNS akan turun menyidik. Dalam hal terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran, maka dapat dilakukan gugatan perdata, yang dilakukan oleh PPNS Kementerian berkoordinasi dengan PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terakhir bila terjadi tindak pidana dalam kerusakan dan/atau pencemaran, maka dilakukan penyidikan dan penyelidikan oleh Polisi dan atau PPNS Lingkungan Hidup.

Politik Hukum Pemerintah di Indonesia tentang Penegakan Prinsip Pencemar Membayar

Penegakan hukum lingkungan merupakan sebuah tanggungjawab negara melalui pemerintah agar tercipta Lingkungan sehat bagi setiap warga negara serta terjaganya kelestarian lingkungan Indonesia. Untuk itu, diperlukan politik hukum dari pemerintah untuk menegakan dan menjaga serta melestarikan lingkungan. Salah satu upaya untuk menegakkan, menjaga, dan melestarikan lingkungan adalah dengan menegakkan

prinsip/asas pencemar membayar kegiatan seperti pertambangan, terhadap perusak lingkungan hidup. pemanfaatan sumber daya hutan,

Adapun Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menangani kasus-kasus pidana lingkungan, yakni:

(1) Penyidik PPNS Kementerian LHK berperan Melakukan Penyidikan terhadap kasus terkait tindak pidana lingkungan

(2) Penyidik PPNS Kementerian LHK Berperan untuk melakukan pencegahan

(3) Penyidik PPNS Berperan untuk melakukan koordinasi Penanganan kasus tindak pidana lingkungan dengan instansi lain yang terkait.

Berdasarkan ketentuan UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidup dijabarkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Strategi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup bertujuan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta memulihkan lingkungan yang sudah tercemar atau rusak, agar menjadi normal kembali sesuai dengan fungsi lingkungannya. Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup pada umumnya diakibatkan oleh berbagai

pemanfaatan rawa, perindustrian, permukiman, pertanian, pengeringan lahan basah untuk kepentingan pembangunan, pembangunan sarana jalan dan perluasan lahan perkantoran dan kegiatan lainnya(Aca Sudandhy dan Rustam Hakim, 2009):

(1) Upaya Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

(2) Upaya Penegakan Hukum terhadap Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

(3) Upaya Pemulihan Lingkungan Hidup

Penegakan hukum yang efektif, berkelanjutan, dan progresif adalah tanda bahwa Negara Indonesia benar-benar melaksanakan prinsip negara hukum sebagaimana yang diatur oleh konstitusi dan penjarabannnya melalui peraturan perundang-undangan. Persamaan didepan hukum dan pemerintahan berlaku pada persoalan lingkungan, artinya tidak memandang kelas dari kegiatan usaha (besar dan kecil) apabila terbukti melakukan perbuatan pidana (delik lingkungan) sebagaimana diatur oleh UU No. 32 tahun 2009 harus dipertanggungjawabkan didepan hukum. Bagi pelaku tindak pidana lingkungan, yang melakukan pencemaran dan perusakan

lingkungan hidup, bentuk tanggungjawabnya tidak hanya sekedar menjalankan pidana penjara tetapi juga tanggung jawab untuk memulihkan kondisi lingkungan yang sudah tercemar dan memberikan biaya pemulihan lingkungan yang tercemar.

SIMPULAN

Tanggung jawab pemerintah terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat dikategorikan menjadi, pertama tanggung jawab pemerintah melalui pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kedua, tanggung jawab pemerintah dalam pemberian izin dan pengawasan izin lingkungan (Pasal 36 UU No. 32 tahun 2009) dan ketiga, tanggung jawab pemerintah dalam rangka penegakan hukum lingkungan yakni dengan melakukan penegakan hukum baik secara administrasi, perdata dan pidana (Pasal 95 UU No. 32 tahun 2009), kepada pelaku pencemaran dan perusak lingkungan hidup. Penerapan Asas Pencemar Membayar Dalam Perkara Perdata Lingkungan Hidup Di Indonesia di dalam Putusan PT. Riau No: 79/PDT/2014/PTR didasarkan Pasal 68 UU 32 tahun 2009,

Pasal 69 ayat (1) huruf a, Pasal 21 UU 32 tahun 2009 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan tanah untuk Produksi Biomassa *in casu* melanggar kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa serta Pasal 87 dan Pasal 88 dalam UU No. 32 tahun 2009, semua gugatan penggugat (KLHK) terhadap pelaku pencemaran lingkungan ditolak oleh 2 Orang Majelis Hakim, hanya Hakim Ketua Majelis yang berpendapat bahwa Si Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (merusak dan mencemari lingkungan dengan cara Melakukan penebangan hutan diluar lokasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) dan Melakukan penebangan hutan didalam lokasi IUPHHK-HT, dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Politik Hukum Pemerintah Di Indonesia Tentang Penegakan Prinsip Pencemar Membayar tercermin dengan kebijakan peningkatan peran penyidik PPNS dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup, Kebijakan Pemerintah dalam rangka untuk upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, upaya penegakan hukum terhadap pencemaran dan upaya

perencanaan program pemulihan kerusakan lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Aca Sudandhy dan Rustam Hakim. (2009). Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berwawasan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan, Cet. 2. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arifin, S. (2014). *Aspek Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Medan: Medan Area University Press.
- Erwin, M. (2011). *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Refika Aditama.
- Husein, S. (2009). *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Sumut: Bayumedia.
- Malvin Edi Darma dan Ahamad Redi. (2018). Penerapan Asas Polluter Pay Principle dan Strict Liability terhadap Pelaku Pembakaran Hutan. *Jurnal Hukum Adigama*, 7.
- Rangkuti, S. S. (1996). *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Siahaan, N. (2014). *Hukum Lingkungan dan ekologi pembangunan. Edisi kedua*. Jakarta: Erlangga.
- Wibisana, A. G. (2017). *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: BP-FH UI.